

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahli Hukum Tata Negara: Pj Kepala Daerah Seharusnya Dipilih DPRD Bukan Pemerintah <https://bit.ly/3vVCAFa>, diakses pada 5 Apr. 2024, pukul 23.00 WIB.
- Ahmad, Saebani Beni, *Fiqh Siyasa*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, cetakan kedua.
- Al Muktabar [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Al\\_Muktabar#cite\\_note-3](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Al_Muktabar#cite_note-3), diakses pada 3 Apr. 2024, pukul 03.25 WIB.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariah Islam*, Jakarta: PT Darul Falah, 2019, cetakan kesembilan.
- Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013. (pdf)
- Argawati, Utami, “*Pilkada Serentak 2024 Akibatkan Masa Jabatan Kepala Daerah Berkurang*”, Mahkamah Konstitusi RI, 13 Oktober 2022.
- Aries, Mujiburohman Dian, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2017, pdf.
- Arifin, Firdaus, Kurnia, Fabian Riza, *Penjabat Kepala Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019. (pdf)
- Asshiddiqie, Jimly, “*Gagasan negara hukum Indonesia*”, (Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, November 2011)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, pdf.
- , *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Aulia, Rahmatika, “*Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*”, UIN SMH BANTEN, 2021.
- Azhar, Isnen, “*Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyah (661-728H)*” *Alfikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, Juni 2019.

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. (pdf)
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, cetakan ketujuh.
- DPRD Banten Sepakat Usulkan 3 Nama Calon Pj Gubernur kepada Presiden <https://bit.ly/3UjC7Gc>, diakses pada 9 Apr. 2024, pukul 02.30 WIB.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, cetakan kedua.
- Ekie, Ramanda, Dio, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. VI, No. 3, Juli 2022.
- Faisyaha, Nur, Sudarsono, Shinta Hadiyantina, Irfan Amir, "Keabsahan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Akibat Penundaan Pemilihan Kepala Daerah" *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 1 Januari 2023.
- Fujianti, Anisa, "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dalam Kasus Yang Melibatkan ASN", Diss. UIN SMH BANTEN, 2021.
- Geografi <https://bantendev.id/geografi>, diakses pada 31 Des. 2023, pukul 16.00 WIB.
- Ghazali, Abd Moqsith, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis al-Ahkam al-Sulthaniyah", *JAUHAR*, Vol. 2, No. 1, Juni 2001.
- Herning, Sitabuana Tundjung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2020.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2011.
- Maftukha, Assyayuti, Mazdan, "Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional", *Lex Renaissance*, Vol. VII, No. 2, April 2022.

Mahardika, Ahmad Gelora, Sun Fatayati, dan Ferry Nahdian Furqan, *"Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"* Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. II, No. 2, Agustus 2022.

Marwi, Akhmad, *"Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Mataram)"* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadlian, Vol. 4, No. 23, Desember 2016.

Miami, Prameswari, Lala, *"PILKADA dalam Mewujudkan Demokrasi"*, Bawaslu Babel, 2016.

*Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN SMH Banten, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4863>, diakses pada 15 Jun. 2024, pukul 01.00 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/49309/pp-no-6-tahun-2005>, diakses pada 15 Jun. 2024, pukul 01.00 WIB.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39763/perpres-no-16-tahun-2016>, diakses pada 15 Jun. 2024, pukul 01.00 WIB.

Perekonomian Provinsi Banten Terus Tumbuh  
<https://bantenprov.go.id/index.php/berita/perekonomian-provinsi-banten-terus-tumbuh>, diakses pada 31 Des. 2023, pukul 20.00 WIB.

Profil Banten <https://bappeda.bantenprov.go.id/profil-banten>, diakses pada 30 Des. 2023, pukul 23.00 WIB.

Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2021  
<https://dinkes.bantenprov.go.id/pages/profil-kesehatan-provinsi-banten-tahun-2021>, diakses pada 31 Des. 2023, pukul 15.00 WIB.

Profil Provinsi Banten <https://dpk.bantenprov.go.id/profil-provinsi-banten>, diakses pada 31 Des. 2023, pukul 19.30 WIB.

Putusan MK 15/PUU-XX/2022 <https://bit.ly/4aHg564>, diakses pada 4 Apr. 2024, pukul 02.50 WIB.

Putusan MK 67/PUU-XIX/2021 <https://bit.ly/442lO3v>, diakses pada 4 Apr. 2024, pukul 02.50 WIB.

- Ramanda, Dio Ekie, *"Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah."* JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. VI, No. 3, Juli 2022.
- Ramdani, Dadan, *"Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024"* Tesis UII, Agustus 2022.
- Ratih, Harmanti, Sri, *"Konstitusionalitas Pengisian Penjabat Gubernur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah"*, Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Sejarah Banten <https://bantenprov.go.id/sejarah-banten>, diakses pada 30 Des. 2023, pukul 15.00 WIB.
- Sejarah Provinsi Banten <https://bit.ly/440uJ5A>, diakses pada 30 Des. 2023, pukul 23.21 WIB.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Soemantri, Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Suarna, A, *"Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)"*, Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Terjemah Sunan Abu Dawud jilid 3 <https://bit.ly/3JjecjF>, diakses pada 6 Apr. 2024, pukul 03.00 WIB.
- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>, diakses pada 12 Jan. 2024, pukul 18.30 WIB.
- Undang-undang 23 Tahun 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, diakses pada 1 Apr. 2024, pukul 05.00 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>, diakses pada 1 Okt. 2023, pukul 01.00 WIB.

- Undang-undang                      No.                      10                      Tahun                      2016  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311>, diakses pada 30 Mar. 2024, pukul 23.20 WIB.
- Undang-undang                      Nomor                      5                      Tahun                      2014  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>, diakses pada 3 Apr. 2024, pukul 03.00 WIB.
- Undang-undang                      Nomor                      9                      Tahun                      2015  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>, diakses pada 15 Jun. 2024, pukul 01.00 WIB.
- visi dan Misi Provinsi Banten <https://bantenprov.go.id/visi-dan-misi-provinsi-banten>, diakses pada 30 Des. 2023, pukul 22.00 WIB.
- Wawancara Pribadi dengan Akhmad Syaefullah, Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum SetDa Provinsi Banten, Serang, 26 Maret 2024.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017, cetakan keempat.
- Yusyanti, Diana, “*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah*”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. IV, No. 1, April 2015.